

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAKARTA PUSAT
2025

TIM PENYUSUN

Pengarah

Frista Yorhanita

Penyusun

Ketua : Ermin Nurman

Anggota :

1. Khushnul Khotimah
2. Ririn Ambarwati
3. Mariyatul Qibtiyah
4. Aksa Setia Mukti
5. R. Rizki Andhitya Yunanto
6. Yuli Nugroho
7. Nurdiansyah

Kontributor :

1. Tim Kerja Penyusun Laporan Direktorat Sumberdaya Kelautan
2. Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi Direktorat Sumber Daya Kelautan selama Tahun 2025 dalam meningkatkan kawasan sentra ekonomi garam, revitalisasi lahan garam, usaha kelautan berkelanjutan serta meningkatkan perizinan berusaha sumber daya kelautan.

Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Direktorat Sumberdaya Kelautan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2025

Direktur Sumber Daya Kelautan



Frista Yorhanita

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Sumber Daya dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses pengukuran dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

**Target
2025**

12 IKK

**Nilai
Capaian
Organisasi**

106,44%

Predikat Baik

Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan terdiri atas 12 indikator kinerja kegiatan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 adalah sebesar 106,44% (Baik). Dari 12 indikator kinerja tersebut, 6 indikator kinerja telah melampaui target, dan 6 indikator kinerja telah mencapai target dengan baik.

Pada tahun 2025 alokasi Direktorat Sumberdaya Kelautan sebesar Rp.27.225.039.510 yang terdiri atas 2 komponen yaitu Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Rp.25.329.070.000) dan Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Rp.1.895.969.510). Selanjutnya pada pertengahan tahun terjadi revisi penambahan anggaran menjadi Rp.878.606.790.000 yang terdiri atas 2 komponen yaitu Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Rp.877.322.088.000) dan Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Rp.1.284.702.000). Dengan penambahan anggaran tersebut, perjanjian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Tahun 2025 mengalami revisi berupa penambahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Realisasi anggaran Direktorat Sumberdaya Kelautan Tahun 2025 adalah Rp.826.029.702.396 dari total pagu Rp. 868.418.007.000 atau sebesar 95,12%.

Sasaran kegiatan terdiri atas 5 (lima) sasaran kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Semua indikator kinerja selama Tahun 2025 yang tercapai dengan baik, melebihi target dengan rincian sebagai berikut:

1. IKK 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan dengan target 1 kawasan tercapai 1 kawasan atau sebesar 100%;
2. IKK 2 Luas lahan garam yang direvitalisasi dengan target 1000 hektar, tercapai 1.143,99 hektar atau sebesar 114,4%;
3. IKK 3 Kawasan BMKT yang dikelola dengan target 1 kawasan, tercapai 1 kawasan atau sebesar 100%;
4. IKK 4 Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan, dengan target 1 unit bisnis, tercapai 1 unit atau sebesar 100%;
5. IKK 5 Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta m³), dengan target 400 juta m³, dengan capaian 850 juta m³ atau sebesar 120%;
6. IKK 6 Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%), dengan target 100%, dengan capaian 100% atau sebesar 100%;
7. IKK 7 Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai) dengan target nilai 70, dengan capaian 80,95 atau sebesar 115,64%;
8. IKK 8 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen) dengan target 3 Dokumen, dan capaian 3 Dokumen atau tercapai sebesar 100%;
9. IKK 9 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks) dengan target indeks 80, dengan capaian 85,83 atau sebesar 107,29%;
10. IKK 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) dengan target 80% dan tercapai 95,2% atau sebesar 119%;
11. IKK 11 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) dengan target 100% dan tercapai 100% atau sebesar 100%;
12. IKU 12 Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai) dengan target nilai 80 dan tercapai 80 atau sebesar 117,5%.

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan terdapat beberapa tantangan, antara lain: 1) kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) lahan garam ekstensifikasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi *clean and clear*; 3) penyelesaian status BMKT ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya), serta 4) minimnya pemahaman pelaku usaha terkait perijinan berusaha. Upaya yang dilakukan dalam menjawab berbagai tantangan dan peningkatan kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan antara lain: meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun *stakeholder* dalam mewujudkan

target swasembada garam, penyelesaian status BMKT ODCB, serta meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan BMKT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR GAMBAR	III
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	1
1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	2
1.3. ISU STRATEGIS ORGANISASI	3
BAB II. PERENCANAAN	5
2.1. VISI, MISI DAN TUJUAN	5
2.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5
2.3. PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
3.1.1. IKK 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan) ..	12
3.1.2. IKK 2 Luas lahan garam yang direvitalisasi (Hektar)	15
3.1.3. IKK 3 Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	23
3.1.4. IKK 4 Unit Bisnis Biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	27
3.1.5. IKK 5 Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	32
3.1.6. IKK 6 Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%) ...	37
3.1.7. IKK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	45
3.1.8. IKU 8 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	47
3.1.9. IKU 9 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	49
3.1.10. IKK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	53
3.1.11. IKK 11 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	54
3.1.12. IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	56
3.2. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tahun 2025.....	10
Tabel 2. Capaian IKK kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan)	12
Tabel 3. Capaian IKK Luas lahan yang direvitalisasi.....	16
Tabel 4. Rincian kegiatan intensifikasi tambak garam	19
Tabel 5. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (kawasan)	24
Tabel 6. Lokasi pengelolaan BMKT	26
Tabel 7. Capaian IKK Unit Bisnis Biofarmakologi yang Dikembangkan (Unit Bisnis)	28
Tabel 8. Capaian IKK Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta m3)	33
Tabel 9. Capaian IKK Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)	39
Tabel 10. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai).....	46
Tabel 11. Capaian Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen).....	48
Tabel 12. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (indeks).....	52
Tabel 13. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan (%).....	53
Tabel 14. . Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	55
Tabel 15. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Stuktur Organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan	2
Gambar 2. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Biru	7
Gambar 3. Nilai Pencapaian Organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan	9
Gambar 4. Lokasi kawasan tambak garam	13
Gambar 5. Dokumentasi Pekerjaan K-SIGN	15
Gambar 6. Lokasi K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao	18
Gambar 7. Pekerjaan Galian dan Timbunan Kolam Peminihan Pond 2, Tanggul Luar Pond & Saluran Drainase Luar Pond dan Tanggul Batas Pond	18
Gambar 8. Pekerjaan% Timbunan Tanah, Pekerjaan LC Jalan Utama, Pekerjaan Bekisting dan Wiremesh, Pengecoran Rigid Beton	18
Gambar 9. Gambar7 Gudang Garam Rakyat	20
Gambar 10. Pekerjaan Long Storage dan Tunnel SWRO	20
Gambar 11. Gudang Garam Nasional dan Gudang Garam Rakyat	20
Gambar 12. Pekerjaan tunnel SWRO dan Long Storage di Kabupaten Cirebon	21
Gambar 13. Gudang Garam Rakyat dan Long Storage di Kabupaten Pati	24
Gambar 14. Geomembran dan Petakan	21
Gambar 15. Pompa Air Laut dan Selang dan Mobile Dryer Plant	22
Gambar 16. Workshop Swasembada Garam di Jakarta	23
Gambar 17. Dokumentasi kegiatan workshop pengembangan pangan fungsional	30
Gambar 18. Sampel produk biofarmakologi	30
Gambar 19. Dokumentasi kegiatan workshop hilirisasi produk biofarmakologi	31
Gambar 20. Dokumentasi kegiatan penyusunan RKT	36
Gambar 21. Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim Pelayanan Berusaha	40

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.

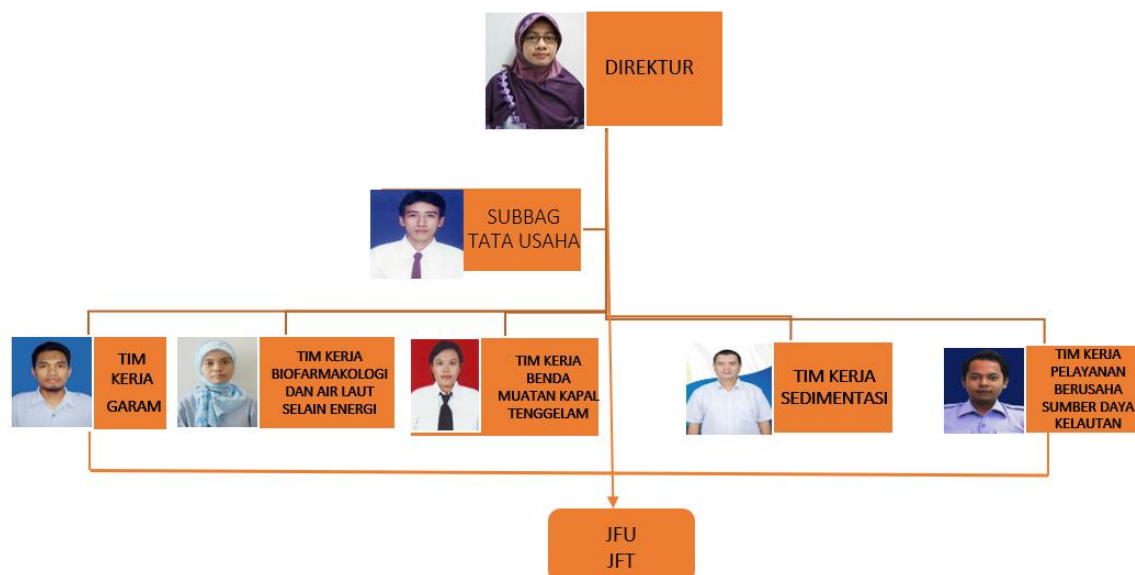
Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut,

- pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sumber Daya Kelautan ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan

Direktorat Sumberdaya Kelautan didukung oleh 52 orang pegawai, yang terdiri dari 20 orang pegawai wanita, dan 32 orang pegawai laki-laki. Berdasarkan status kepegawaiannya,

pegawai didominasi oleh ASN sebanyak 32 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 12 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 4 orang dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 4 orang.

Berdasarkan status jabatan fungsionalnya terdapat 2 jabatan fungsional di Direktorat Sumberdaya Kelautan yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) sebanyak 6 orang pegawai dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) sebanyak 26 orang pegawai. Untuk JFT PELP terdiri atas 1 orang ahli madya, 2 orang ahli muda dan 3 orang ahli pertama. Sementara untuk JFT APJK terdiri atas 1 orang ahli utama, 8 orang ahli madya, 11 orang ahli muda, dan 6 orang ahli pertama.

1.3. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis yang menjadi fokus Direktorat Sumberdaya antara lain :

1. Kebutuhan garam dalam negeri yang meningkat setiap tahun. Seperti yang diketahui rata-rata kebutuhan garam nasional berada di kisaran 4,6 – 4,9 juta ton dengan rata – rata importasi diatas 2,6 juta ton atau berkisar lebih dari 50% merupakan hasil impor. Hal ini menunjukkan bahwa produksi garam di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam secara nasional baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Mengingat potensi sumber daya kelautan Indonesia, pengembangan garam di Indonesia masih dapat dioptimalkan. Untuk itu, melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, pemerintah berupaya untuk mencapai target swasembada garam pada tahun 2027. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan intervensi teknologi dalam pembuatan garam;
2. Pemanfaatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dikelola Direktorat Sumberdaya Kelautan merupakan bentuk komitmennya dalam mengelola asset negara yang bernilai ekonomi, budaya dan ekologis. Sesuai Peraturan Presiden No 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan BMKT mencakup 2 kegiatan utama yaitu pengangkatan dan pemanfaatan *in situ*. Pengelolaan ini menjadi penting dikarenakan dengan pengelolaan ini diharapkan dapat memperkuat program ekonomi biru;
3. Pemanfaatan biota laut Indonesia berpotensi dikembangkan menjadi sumber bahan bioaktif. Potensi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai sumber daya alam strategis dalam pengembangan biofarmakologi, yaitu pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam bidang farmasi, nutrasetikal, dan kosmetik.

Dengan pemanfaatan biota laut sebagai biofarmakologi diharapkan mampu mendukung program ekonomi biru;

4. Sedimentasi merupakan proses alamiah yang terjadi dimana partikel padat tersuspensi dalam cairan mengendap karena gravitasi sehingga membentuk lapisan sedimen di dasar. Sedimentasi di laut seringkali terjadi akibat kelanjutan erosi yang membawa material kehilangan momentum dan mengendap. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut. Selain itu, pemanfaatan hasil sedimen di laut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sumber daya kelautan tersebut.

BAB II. PERENCANAAN

2.1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi, misi, dan tujuan Direktorat Sumber Daya Kelautan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.

Visi Direktorat Sumber Daya Kelautan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN tahun 2025-2029, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumberdaya berbasis ekonomi biru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam implementasinya ekonomi biru dijalankan secara terukur, berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global. Pembangunan tidak lagi

hanya mengejar peningkatan produksi, melainkan menempatkan perlindungan laut dan keberlanjutan ekosistem sebagai dasar dari seluruh kebijakan.

Kerangka pikir pembangunan ekonomi biru didasarkan pada empat aspek utama:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai sistem utama pembangunan nasional

Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine growth* pertumbuhan ekonomi. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional diharapkan mampu berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, menggeliatkan ekonomi regional dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan lintas sektor. Ekologi sebagai panglima

2. Ekonomi biru memprioritaskan pada keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Perlindungan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam memberikan ruang hidup bagi sumber daya di laut, pesisir dan pulau – pulau kecil. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan sumber pangan akuatik secara berkelanjutan;

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

Ekonomi biru merupakan solusi untuk menjaab tantangan pasar domestik dan global. Dengan peningkatan produk yang memiliki daya saing kompetitif dan komparatif sesuai dengan preferensi konsumen yang terus berubah secara dinamis, sehingga diharapkan dapat menguatkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan dan perikanan Indonesia di pasar global.

4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi

Untuk menjawab perubahan yang cepat dan dinamis pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial, peran teknologi, inovasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk akselerasi implementasi ekonomi biru. Dengan pengembangan inovasi teknologi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akses informasi secara akurat, otomatisasi, *up to date*, dan *real-time*, serta mendorong nilai tambah pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.

Selain itu, ekonomi biru juga berlandaskan empat pendekatan pembangunan, yaitu:

- a. Tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah;
- b. Holistik, dengan mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan;
- c. Integratif, melalui sinergi dan integrasi antara proogram dan anggaran lintas sektor; dan
- d. Spasial, pembangunan berbasis ruang dan wilayah, untuk memastikan pemerataan, keterpaduan antarwilayah, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya.

Empat pendekatan ekonomi biru dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Empat pendekatan pembangunan ekonomi biru dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pendekatan Pembangunan Ekonomi Biru

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, maka sasaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Pertama : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (kawasan)
2. Sasaran Kegiatan Kedua: Meningkatnya Lahan Garam yang direvitalisasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Luas lahan garam yang direvitalisasi (hektar)
3. Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)
 - b. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)
 - c. Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M³)
4. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)

5. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
 - b. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)
 - c. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
 - e. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
 - f. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

2.3. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Sasaran Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2025.

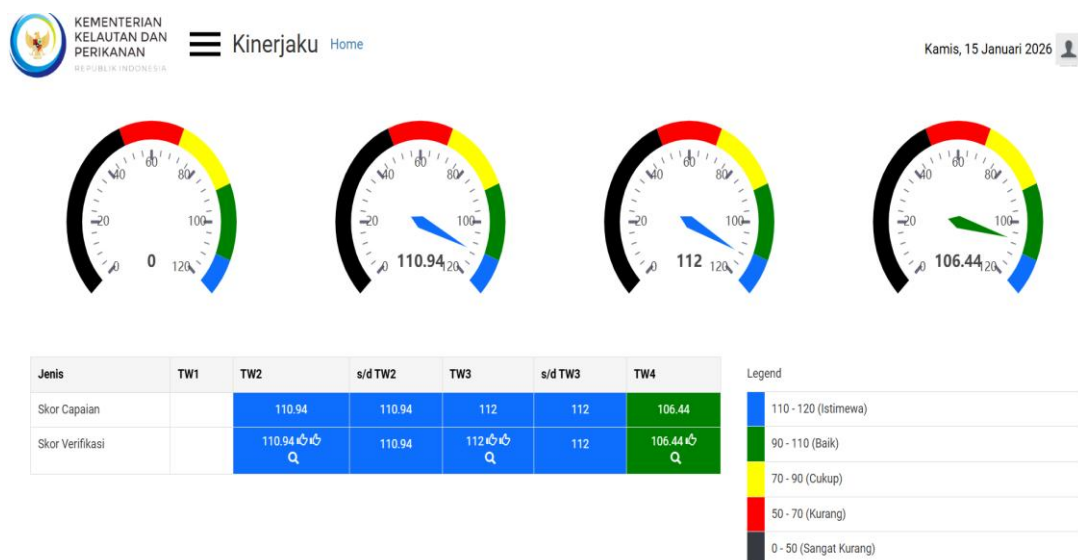
Indikator dan Target Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan. Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan pertama kali disusun pada bulan 30 Juni 2025 dengan anggaran senilai Rp. 27.225.039.510 dengan 4 sasaran kegiatan dan 11 indikator kinerja kegiatan. Seperti ditampilkan pada Lampiran 1. Hal ini dikarenakan pada bulan Januari 2025 Perjanjian Kinerja masih menggunakan nomenklatur Direktorat Jasa Kelautan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 103. 228.291. 000,- Pada akhir tahun 31 Desember 2025, Direktorat Sumberdaya Kelautan kembali merevisi Perjanjian Kinerjanya akibat adanya penambahan anggaran di akhir tahun. Penambahan anggaran tersebut mengakibatkan Direktorat Sumberdaya Kelautan menambah sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatannya. yang terdiri dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun Perjanjian Kinerja tersebut ditampilkan pada Lampiran 2.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan pada Tahun 2025 adalah **106,44 (Baik)** untuk IKK pada aplikasi kinerjaku. Nilai pencapaian kinerja organisasi Direktorat Sumberdaya Kelautan tahun 2025 ditampilkan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan 2025.

Tabel 1. Tabel sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
1.	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam	1.	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	1	1	100%
2.	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	2.	Luas lahan garam yang direvitalisasi (Hektar)	1.000	1.143,99	114,4%
3.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	3.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1	1	100%
		4.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1	1	100%
		5.	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	400	850	120%
4.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan	6.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	100	100	100%
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	7.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	70	80,95	115,64%
		8.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	3	3	100%
		9.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80	85,83	107,29%
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80	95,2	119%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	100	100	100%
		12	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	80	94	117,5%

3.1.1. IKK 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional adalah wilayah yang dikembangkan secara terencana sebagai pusat produksi, pengolahan, dan distribusi garam nasional yang terintegrasi, mulai dari kegiatan hulu (produksi garam rakyat/industri), antara pengolahan dan pemurnian hingga hilir (distribusi dan pemanfaatan industri) guna mendukung swasembada dan kemandirian garam nasional secara ekstensifikasi dan intensifikasi.

Tahapan pembangunan akan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga ujicoba operasional produksi garam. Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk.

Teknik Menghitung:

Jumlah kawasan industri garam yang dibangun prasarana dan fasilitas produksi garam.

Tabel 2. Capaian IKK kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan (kawasan)

SK-1	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam					
IKK - 1	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan	-	-

Pengembangan kawasan sentra industri garam dilaksanakan di 1 (satu) kawasan yaitu di Kabupaten Rote Ndao. Kawasan ini telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang lokasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026. Hal ini sesuai dengan target indikator kinerja kegiatan kawasan sentra industri garam yang dikembangkan yaitu 1 (satu) kawasan atau telah tercapai 100%. IKK kawasan sentra industri garam nasional yang dikembangkan merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

target Renstra DJPK 2029. Namun indikator ini mendukung target Renstra Direktorat Pengelolaan Kelautan yaitu Produktivitas lahan garam rakyat.

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan adalah tercapainya target sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 yaitu 1 unit kawasan sentra industri garam yang dibangun. Kendala yang dihadapi saat pembangunan sarana dan prasarana di kawasan strategis industri garam nasional, antara lain : permasalahan penyiapan lahan dan perubahan desain menyesuaikan kondisi di lapangan. Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian kendala yang dihadapi antara lain : pelibatan pemerintah daerah dan instansi terkait lain seperti ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian, Kementerian PU, serta aparat desa; mempercepat pekerjaan dengan menambah personil, alat berat, waktu pekerjaan; dan menyusun strategi penyelesaian pekerjaan yang lebih sesuai dengan kondisi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Dalam proses pembangunan sarana/prasarana melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dan keterlibatan dinas setempat sebagai tim teknis.

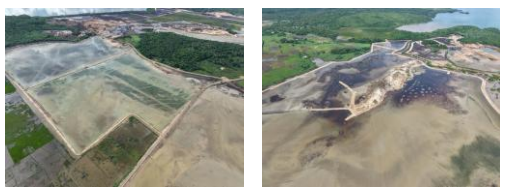


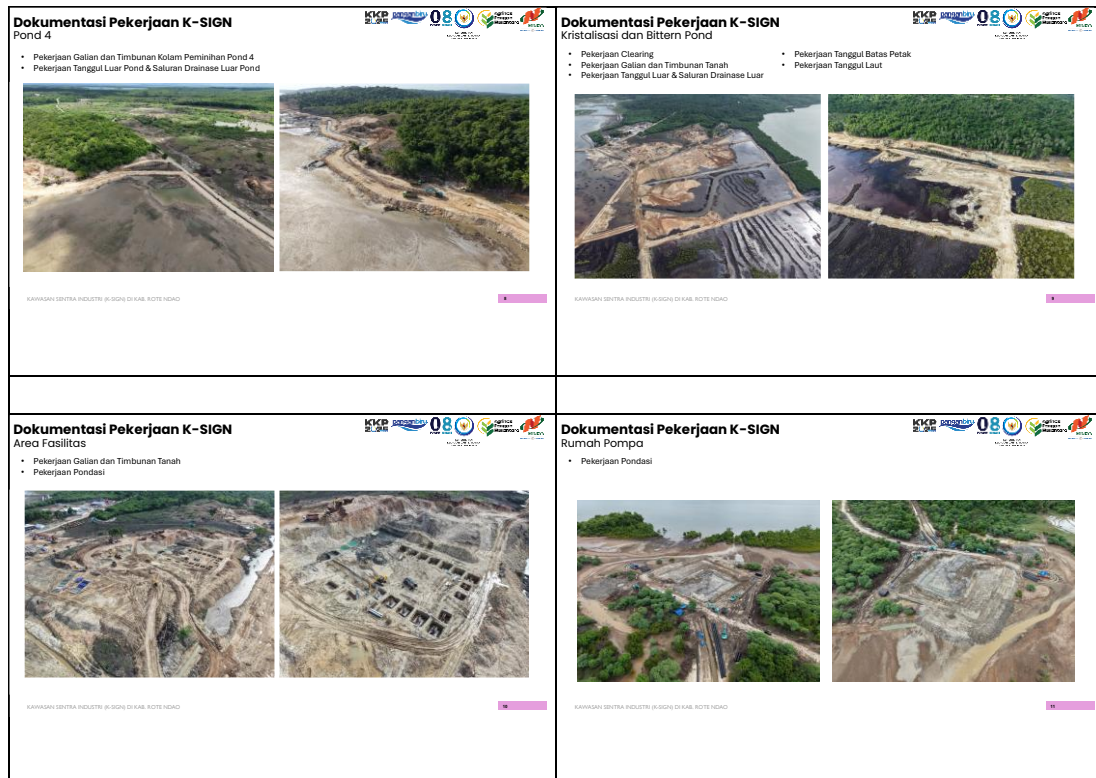
Gambar 4. Lokasi kawasan tambak garam

Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai kegiatan yang termasuk dalam dukungan pembangunan prasarana usaha garam, yaitu :

- (i) Penyediaan Konsultan Manajemen Konstruksi K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao
- (ii) Penyusunan Feasibility Study
- (iii) Penyusunan basic desain
- (iv) Penyusunan Legal Opinion Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao
- (v) Pengurusan ijin lingkungan,
- (vi) Pemetaan dan penyiapan lahan
- (vii) Perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, Jalan, Gudang, perkantoran, dan rumah pompa

Dokumentasi Pekerjaan K-SIGN Pond 0 • Pekerjaan Galian & Timbunan Tanah • Pekerjaan Tanggul  KAWASAN SENTRA INDUSTRI (K-SIGN) DI KAB. ROTE NDAO	Dokumentasi Pekerjaan K-SIGN Pond 1 • Pekerjaan Galian dan Timbunan Kolam Pemeliharaan Pond 1 • Pekerjaan Tanggul Luar Pond • Pekerjaan Tanggul Petak Pond  KAWASAN SENTRA INDUSTRI (K-SIGN) DI KAB. ROTE NDAO
Dokumentasi Pekerjaan K-SIGN Pond 2 • Pekerjaan Galian dan Timbunan Kolam Pemeliharaan Pond 2 • Pekerjaan Tanggul Luar Pond & Saluran Drainase Luar Pond • Pekerjaan Tanggul Batas Pond  KAWASAN SENTRA INDUSTRI (K-SIGN) DI KAB. ROTE NDAO	Dokumentasi Pekerjaan K-SIGN Pond 3 • Pekerjaan Persiapan Tanggul dan Drainase Keliling  KAWASAN SENTRA INDUSTRI (K-SIGN) DI KAB. ROTE NDAO



Gambar 5. Dokumentasi Pekerjaan K-SIGN

Rencana Aksi Triwulan 1 Tahun 2026

1. Penyelesaian kegiatan pembangunan sarana prasarana garam di Kabupaten Rote Ndao;
2. Penyusunan rencana operasionalisasi sarana prasarana garam di Kabupaten Rote Ndao.

3.1.2. IKK 2 Luas lahan garam yang direvitalisasi (Hektar)

Lahan garam yang direvitalisasi adalah lahan garam yang dilakukan perlakuan atau kegiatan langsung maupun tidak langsung agar meningkat produktivitasnya. Perlakuan langsung diantaranya pelapisan geomembrane dan perbaikan lahan (intensifikasi), termasuk pembukaan lahan garam baru (ekstensifikasi). Perlakuan tidak langsung diantaranya perbaikan terhadap saluran air yang mengalirkan air laut sebagai bahan baku pembuatan garam sehingga lahan-lahan garam di sekelilingnya dapat meningkat produksinya (*long storage*).

Teknik Menghitung:

Luas lahan garam yang dibangun melalui ekstensifikasi ditambah luas lahan garam yang memperoleh manfaat akibat dilakukannya pelapisan geomembrane perbaikan saluran irigasi (*long storage*).

Tabel 3. Capaian IKK Luas lahan yang direvitalisasi

SK-2	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi					
IKK - 2	Luas lahan garam yang direvitalisasi (hektar)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	1000	1.143,99	114,4%	1000	-	-

Capaian indikator kinerja kegiatan luas lahan yang direvitalisasi pada tahun 2025 sebesar 1.143,99 hektar dari target luas lahan yang direvitalisasi seluas 1000 hektar. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan atau sebesar 114,4%. IKK Luas lahan garam yang direvitalisasi merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun indikator ini mendukung target Renstra Direktorat Pengelolaan Kelautan yaitu Produktivitas lahan garam rakyat

Analisis Keberhasilan

Luas lahan garam yang direvitalisasi sebesar 1000 ha, dan pada tahun 2025 capaian luas lahan garam yang direvitalisasi sebesar +1.143,99 ha dengan rincian : 731,94 hektar melalui kegiatan ekstensifikasi di Kabupaten Rote Ndao dan 430,05 hektar melalui kegiatan intensifikasi yang dilakukan di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Indramayu, Cirebon, Pati dan Sabu Raijua.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian luas lahan garam yang direvitalisasi, antara lain : keterlambatan penyediaan lahan yang *clear and clean*, penyusunan desain perencanaan lahan yang sering berubah, serta keterbatasan sumberdaya, dan kondisi alam

Solusi yang dilakukan dalam rangka penyelesaian kendala yang dihadapi antara lain perlunya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, serta

intensif melakukan sosialisasi ke Masyarakat, mempercepat pengesahan desain lahan dan menambah sumberdaya guna mempercepat penyelesaian kegiatan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi sumber daya manusia dalam pencapaian luas lahan garam yang direvitalisasi dengan upaya memaksimalkan produktivitas tenaga kerja di seluruh proses kegiatan garam dengan penggunaan tenaga, waktu, dan keterampilan secara optimal serta keterlibatan SDM Lokal

- **Perencanaan kebutuhan yang tepat**

Identifikasi lokasi strategis: memilih lahan dengan potensi produksi tinggi, akses air laut, dan infrastruktur pendukung.

- **Penggunaan teknologi tepat guna**

Penggunaan teknologi untuk mempercepat evaporasi seperti geomembrane, Seawater Reverse Osmosis (SWRO), *rope salt*

- **Pengelolaan Anggaran dan Logistik**

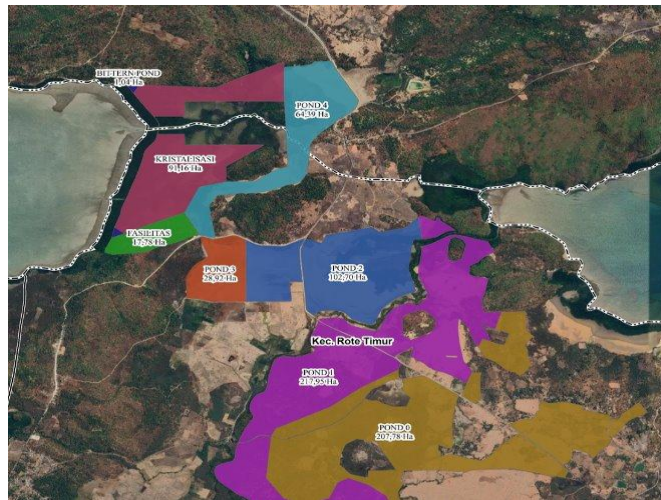
Pengadaan berbasis kebutuhan riil: menghindari pembelian alat atau bahan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan. Efisiensi transportasi dan distribusi: Mengurangi biaya logistik dengan jalur distribusi yang terintegrasi.

Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung untuk mencapai IKU luas lahan garam yang direvitalisasi sebagai berikut :

1. Ekstensifikasi

Pengembangan sentra produksi dilaksanakan dengan modelling ekstensifikasi produksi garam di lahan yang dikelola atau milik pemerintah. Modelling produksi garam bertujuan untuk membangun pilot project penataan lahan garam yang sesuai standar desain lahan garam sehingga bisa dijadikan contoh bagi petambak garam maupun pelaku usaha swasta lainnya akan menjadi contoh tata kelola garam dari hulu ke hilir, atau dari produksi hingga pemasaran karena akan dilengkapi dengan prasarana pasca produksi seperti gudang dan pabrik pengolahan.



Gambar 6. Lokasi K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao



Gambar 7. Pekerjaan Galian dan Timbunan Kolam Peminihan Pond 2, Tanggul Luar Pond & Saluran Drainase Luar Pond dan Tanggul Batas Pond



Gambar 8. Pekerjaan Timbunan Tanah, Pekerjaan LC Jalan Utama, Pekerjaan Bekisting dan Wiremesh, Pengecoran Rigid Beton

2. Intensifikasi

Intensifikasi garam merupakan pendekatan kebijakan untuk meningkatkan produksi, mutu, dan keberlanjutan usaha pergaraman nasional melalui optimalisasi lahan eksisting tanpa melakukan perluasan lahan baru. Dalam pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025, dilaksanakan di (i) Kabupaten Indramayu, (ii) Kabupaten Cirebon, Prov Jawa Barat, (iii) Kabupaten Pati, Prov Jawa Tengah (Pantura Jawa) serta (iv) Kabupaten Sabu Raijua, Prov NTT berupa Revitalisasi Saluran menjadi Long Storage, penataan lahan, Sarana Prasarana (Gudang Garam Nasional, Gudang Garam Rakyat, Washing Plant, Implementasi teknologi evaporasi) serta dukungan (pengawasan, pendampingan).

Tabel 4. Rincian kegiatan intensifikasi tambak garam

No	Uraian	Keterangan
1.	Long Storage	• 3 lokasi
2.	Gudang Garam Rakyat (GGR)	• 16 unit dengan kapasitas rata-rata 200 ton
3.	Gudang Garam Nasional (GGN)	• 2 unit dengan kapasitas 7.000 ton • 2 unit dengan kapasitas 2.000 ton
4.	Teknologi evaporasi	• 1 lokasi dengan teknologi <i>rope salt</i> • 2 lokasi dengan teknologi <i>SWRO</i>
5.	<i>Mobile Dryer</i>	• 1 unit dengan kapasitas 2 Ton/jam

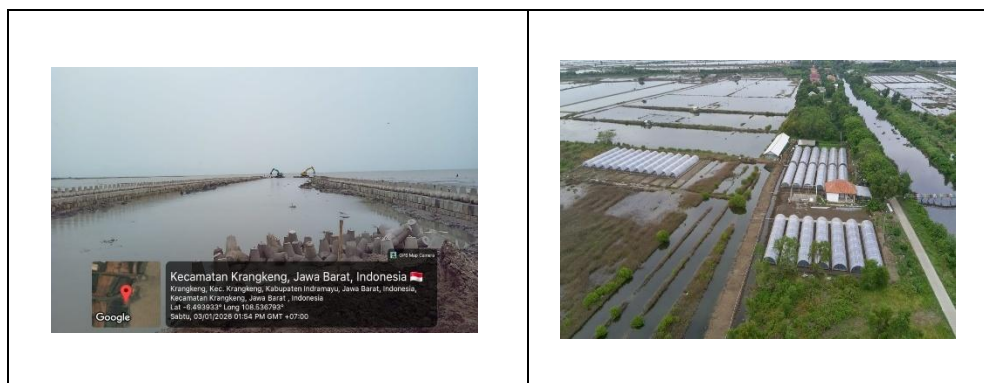
a. Kabupaten Indramayu, Prov Jawa Barat

Telah dilakukan pembangunan : (i) Gudang Garam Nasional 2000 ton, (ii) Gudang Garam Nasional 7000 ton, (iii) Gudang Garam Rakyat di Desa Cemara Kulon, Desa Krimun, Desa Krangkeng (2 unit), Desa Parean Girang,

Desa Luwunggeusik, (iv) pengurugan tanah, (v) jembatan selokan, (vi) tunnel SWRO serta (vii) Revitalisasi Longstorage.



Gambar 9. Gudang Garam Rakyat



Gambar 10. Pekerjaan Long Storage dan tunnel SWRO

b. Kabupaten Cirebon, Prov Jawa Barat

Telah dilakukan pembangunan : (i) Gudang Garam Nasional 2000 ton, (ii) Gudang Garam Nasional 7000 ton, (iii) Gudang Garam Rakyat di Desa Tawang Sari, Desa Pegagan, Desa Pengarengan, Desa Malakasari, Desa Kalisari, (iv) pengurugan tanah, (v) jembatan selokan, (vi) tunnel SWRO serta (vii) Revitalisasi Longstorage Bungko Lor dan Rawa Urip serta Rope Salt Tunnel.



Gambar 11. Gudang Garam Nasional dan Gudang Garam Rakyat



Gambar 12. Pekerjaan tunnel SWRO dan Long Storage di Kabupaten Cirebon

c. Kabupaten Pati, Prov Jawa Tengah

Telah dilakukan pembangunan Gudang Garam Rakyat di Desa Geneng Mulyo dan Desa Agung Mulyo – Kecamatan Juwana, Desa Guyangan, Kecamatan Trangkil, Desa Raci - Kecamatan Batangan serta Revitalisasi *Longstorage*.



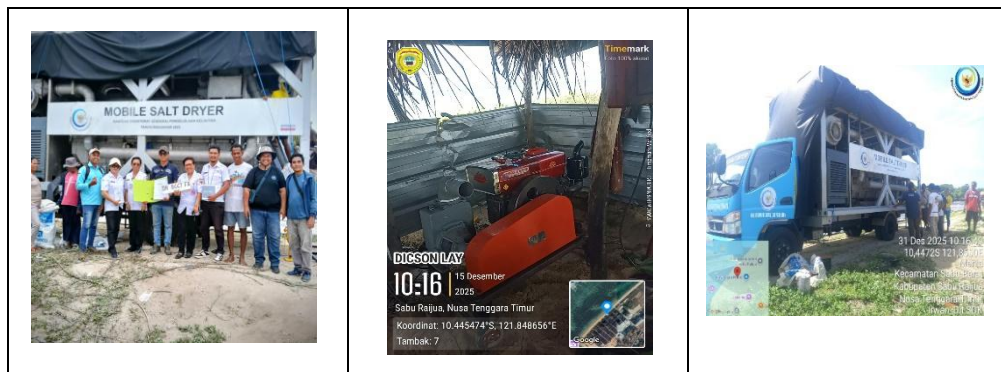
Gambar 13. Gudang Garam Rakyat dan Long Storage di Kabupaten Pati

d. Kabupaten Sabu Raijua, Prov NTT

Revitalisasi dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sabu Barat, Sabu Timur, Sabu Liae dan Hawu Mehara berupa : Geomembran dan Petakan, Pompa Air Laut dan Selang dan *Mobile Dryer Plant*.

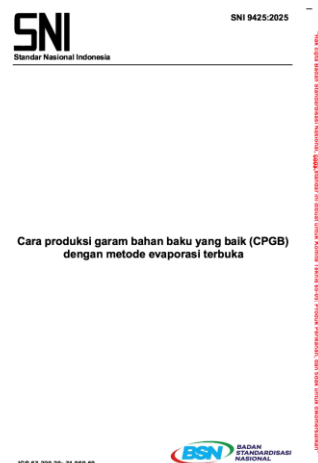


Gambar 14. Geomembran dan Petakan



Gambar 15. Pompa Air Laut dan Selang dan Mobile Dryer Plant

3. Penyusunan SNI Cara Pembuatan Garam Bahan Baku yang baik dengan metode evaporasi



Penetapan SNI 9425 : 2025 tentang Cara Pembuatan Garam Bahan Baku yang baik dengan metode evaporasi melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 706/KEP/BSN/12/2025 tanggal 22 Desember 2025

4. Workshop swasembada garam

Pelaksanaan workshop pada tanggal 4 Desember 2025, di Jakarta dengan tema Swasembada Garam Tahun 2027, yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait. Beberapa materi yang disampaikan pada workshop dimaksud antara lain : penguatan ekosistem industri garam nasional, transformasi importir menjadi investor, peluang investasi dan daya tarik industri garam nasional, Peran BPOM dalam penguatan industri serta peran pemerintah daerah dalam percepatan swasembada garam.



Gambar 16. Workshop Swasembada Garam di Jakarta

Rencana Aksi Triwulan 1 Tahun 2026

1. Pelaksanaan sertifikasi petambak garam;
2. Pendataan garam

3.1.3 IKK 3 Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut yang perlu dipelajari agar kita dapat memahami dan belajar tentang masa lampau mengenai jalur pelayaran, perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kapal dan kenavigasian serta kebudayaan masyarakat di masa lampau sebagai salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan BMKT untuk dikelola secara baik melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata

berkelanjutan baik di lokasi perairan tempat ditemukannya BMKT (insitu), galeri BMKT, Warehouse BMKT, mini galeri dan lainnya.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik koordinat dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi BMKT untuk mengambil kebijakan yang tepat terhadap pengelolaan BMKT secara berkelanjutan.

Teknik Menghitung :

Jumlah kawasan BMKT yang dilakukan identifikasi melalui survei dan penilaian potensi pemanfaatan BMKT.

Tabel 5. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (kawasan)

SK-3	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan					
IKK - 3	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	1	1	100%	1	-	-

Capaian indikator kinerja kegiatan Kawasan BMKT yang dikelola pada tahun 2025 sebesar 1 kawasan dari target kawasan BMKT yang dikelola 1 kawasan atau sebesar 100%. IKK Kawasan BMKT yang dikelola merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2029.

Analisis keberhasilan

Telah terlaksananya pengelolaan BMKT sesuai target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 yaitu 1 kawasan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang dikelola.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serta penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan karena melibatkan K/L lain dan pihak pelaku usaha.

Optimalisasi dan penambahan tenaga teknis lapangan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Koordinasi intens dengan K/L lain dan pihak pelaku usaha.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pelaksanaan aktivitas pada tahun 2025 telah menggunakan beragam sumber yang ada, termasuk sumber daya manusia, alat dan fasilitas pendukung. Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber daya tersebut dinilai cukup efektif, meskipun masih ada beberapa elemen yang perlu diperbaiki agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal.

Kegiatan Pendukung :

1. Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Benda Muatan kapal Tenggela (BMKT)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Benda Muatan kapal Tenggela (BMKT) Kargo Cirebon, Batu Itam dan Tuban yang saat ini tersimpan di Gudang BMKT Cileungsi dan *Marine Heritage Gallery*, proses penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) telah selesai 100% yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebanyak 137.378 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN BMKT telah dilakukan *entry* data dan diunggah foto *geotagging* pada Aplikasi SIMAN V2.

2. Identifikasi Lokasi Benda Muatan Kapal Tenggela (BMKT)

Kegiatan Identifikasi Lokasi Benda Muatan Kapal Tenggela (BMKT) dilaksanakan di Perairan Pulau Untung Jawa, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang secara historis merupakan kawasan penting dalam jalur pelayaran dan aktivitas maritim di wilayah Teluk Jakarta. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini berpotensi menyimpan tinggalan kapal tenggela beserta muatannya yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Identifikasi ini bertujuan untuk indikasi awal temuan Benda Muatan Kapal Tenggela (BMKT) melalui integrasi data survei penyelaman dan penggunaan alat aquatic survei berupa *Side Scan Sonar* (SSS) dan *Sub-Bottom Profiler* (SBP). Hasil analisis menunjukkan adanya sebaran BMKT serta objek menyerupai bangkai kapal tenggela dengan dimensi sekitar 15 m × 12 m dengan ketinggian tumpukan keramik setinggi 1,8 meter. Temuan sebaran fragmen keramik memperkuat dugaan keberadaan BMKT di lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi lokasi temuan keramik Benda Muatan Kapal Tenggela (BMKT) di Perairan Untung Jawa, dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut berpotensi untuk dikelola melalui kegiatan pengangkatan dan

penyelamatan BMKT, mengingat sifat benda tersebut yang mudah dipindahkan (*moveable*) atau terjadi pengangkatan BMKT ilegal dan berdasarkan hasil identifikasi kapal tenggelam, dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut memiliki indikasi kuat keberadaan BMKT berupa struktur kapal tenggelam dan kapal tenggelam in-situ. Oleh karena itu, area tersebut direkomendasikan untuk diklasifikasikan sebagai lokasi wisata kapal tenggelam karena kondisi kapal utuh dan menjadi habitat ikan.

3. Pembagian Benda Muatan kapal Tenggelam (BMKT)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) mengamanatkan pembagian BMKT oleh Menteri setelah ditetapkan sebagai koleksi negara, dengan ketentuan 50% untuk Pemerintah Pusat dan 50% untuk pelaku usaha. Kegiatan pembagian tahun 2025, telah diselesaikan pembagian sebanyak 5 pengangkatan BMKT, sebagai berikut:

Tabel 6. Lokasi pengelolaan BMKT

No	Pengangkatan	Pembagian (keping)		Keterangan
		Pemerintah	Pelaku Usaha	
1	Karawang	3.663	3.676	• Bagian pelaku usaha akan diangkut 21 Januari 2025 dari Gudang BMKT Cileungsi • Bagian pemerintah masih tersimpan di Gudang BMKT Cileungsi dan masih menunggu pembicaraan antar pimpinan KKP dan Kementerian Kebudayaan terkait status ODCB
2	Belitung Timur	17.098	17.103	
3 & 4	Batu Belobang dan Kijang	5.087	5.085	Bagian pemerintah sudah dipindahkan ke Gudang BMKT Cileungsi dari Gudang pelaku usaha di Batam pada tanggal 30 Desember 2025

5	Ujung Pamanukan Tahap I	19.421	19.421	• Sudah dilakukan Pembagian Tahap I, namun finalisasi 21-22 Januari 2025 • Akan dilaksanakan pembagian tahap II karena terdapat BMKT yang tidak tercatat pada saat proses pengangkatan
---	-------------------------	--------	--------	---

Rencana Aksi Triwulan 1 Tahun 2026

1. Melanjutkan pembagian BMKT hasil pengangkatan Ujung Pamanukan, BMKT Karang Cina dan Blanakan;
2. Identifikasi lanjutan BMKT Untung Jawa, Kepulauan Seribu

3.1.4. IKK 4 Unit Bisnis Biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Wilayah perairan Indonesia yang tergolong dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*) menjadi habitat bagi ribuan spesies biota laut, mulai dari mikroorganisme, invertebrata, hingga flora dan fauna laut yang memiliki potensi besar sebagai sumber bahan bioaktif.

Potensi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai sumber daya alam strategis dalam pengembangan biofarmakologi, yaitu pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam bidang farmasi, nutrasetikal, dan kosmetik. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa senyawa yang dihasilkan dari spons laut, alga, bakteri laut, dan biota lainnya memiliki aktivitas antibakteri, antivirus, antikanker, antiinflamasi, dan imunomodulator.

Pasar ekspor produk kelautan cukup besar yang ditunjang dengan potensi sumber daya hayati yang cukup melimpah. Hal ini dapat mendukung industri biofarmakologi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan, mulai dari pangan alternatif, kosmetik, suplemen, obat, hingga rekayasa energi ramah lingkungan untuk biofuel. Selama ini Indonesia lebih banyak mengeksport produk biofarmakologi dalam bentuk

bahan baku atau setengah jadi dan mengimpornya kembali ketika sudah menjadi barang jadi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produk biofarmakologi antara lain standarisasi bahan baku belum dikuasai oleh sebagian UMKM, bahan baku dari laut relatif lebih mahal dibanding dengan terestrial, keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk, akses permodalan, dan banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin edar sehingga pasarnya terbatas.

Biofarmakologi adalah pemanfaatan biota baik hewan maupun tumbuhan yang ada di laut/perairan, termasuk biota air laut, air payau dan air tawar, sebagai obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan dilakukan melalui pemetaan potensi calon lokasi pengembangan unit bisnis biofarmakologi.

Teknik menghitung:

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan potensi untuk pengembangan unit bisnis biofarmakologi.

Tabel 7. Capaian IKK Unit Bisnis Biofarmakologi yang Dikembangkan (Unit Bisnis)

SK-4	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan					
IKK - 4	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (unit)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	-

Capaian indikator kinerja kegiatan Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan pada tahun 2025 sebesar 1 unit dari target unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan atau sebesar 100%. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra DJPK 2029. Adapun unit bisnis yang dikembangkan berupa albumin ikan gabus hasil produksi Koperasi Produsen Fortuna Lima Sembilan Cirebon, minyak ikan hiu botol hasil produksi Koperasi Produsen Sinar

Tanjung Bahari Lombok Timur, dan minyak urut Fahirah dari bahan rumput laut hasil produksi CV. Bulan Bintang Makassar.

Analisis keberhasilan

Keberhasilan kegiatan adalah tercapainya target sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 yaitu 1 unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan melalui pemetaan potensi biofarmakologi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu 1) untuk mendapatkan sertifikat CPOTB dari BPOM perlu perubahan desain ruang produksi sehingga memerlukan biaya tambahan, 2) Keterbatasan data dan informasi untuk menyusun buku biofarmakologi; 3) Pelaku usaha memiliki keterbatasan dana untuk melakukan uji laboratorium produk yang dihasilkan.

Solusi yang dilakukan adalah mendorong kelompok untuk memperbaiki ruang produksi sesuai rekomendasi BPOM secara mandiri atau swadaya mengingat anggaran KKP terbatas, 2). menggali data dan informasi dari para pelaku usaha, jurnal, sumber terpercaya. Bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berpengalaman dalam menyusun buku biofarmakologi, 3). Memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan uji laboratorium terakreditasi.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Beberapa pertemuan dilakukan secara daring untuk efisiensi anggaran, seperti pembahasan buku biofarmakologi, pembinaan pelaku usaha biofarmakologi, dan workshop biofarmakologi dan bioteknologi kelautan.

Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain :

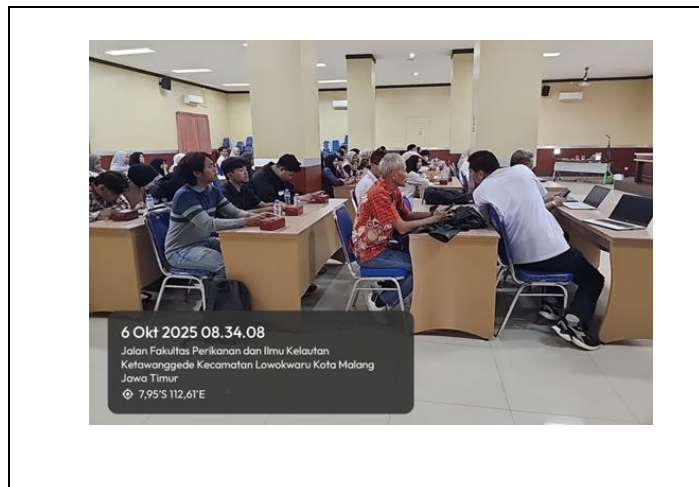
1. Penyusunan Buku Biofarmakologi

Penyusunan buku biofarmakologi melibatkan Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Pertemuan dilaksanakan secara luring dan daring pada tanggal 7 Oktober, 21 November, 8 Desember, 17 Desember, dan 24 Desember 2025. Beberapa hal yang dibahas antara lain desain buku, sistematika penulisan, ruang lingkup dan batasan pembahasan, materi buku, sumber data dan informasi,

studi lapang untuk pengkayaan data dan informasi, ilustrasi dan pendukung visual, jenis dan ukuran kertas, bentuk huruf, sampul, biografi penulis.

2. Workshop Pengembangan Pangan Fungsional

Pada tanggal 6 Oktober 2025 dilaksanakan Workshop Pengembangan Pangan Fungsional bertempat di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Workshop mengusung tema “Pengembangan Pangan Fungsional dari Laut untuk Mendukung Ketahanan Pangan”. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Sumber Daya Kelautan, Dekan FPIK UB, dan Dr. Fuad. Peserta berasal dari pengajar dan mahasiswa FPIK UB. Adapun pemateri dan materi yang disampaikan antara lain: (1) Prof. Dr. Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi., M.P., dengan materi Marine Pharmaceutical, Cosmoceutical & Biofunctional; (2) Direktur Sumber Daya Kelautan dengan materi Pengembangan Pangan Fungsional dari Laut dan Swasembada Garam; (3) Dr. Fuad menyampaikan materi tentang Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Pangan Fungsional.



Gambar 17. Dokumentasi kegiatan workshop pengembangan pangan fungsional

3. Fasilitasi pemeriksaan sampel produk biofarmakologi mendukung pengembangan produk siap edar

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi UMKM dalam melakukan uji terhadap sampel produk yang dihasilkan. Telah dilakukan uji sampel albumin ikan gabus hasil produksi Koperasi Produsen Fortuna Lima Sembilan Cirebon, minyak ikan hiu botol hasil produksi Koperasi Produsen Sinar Tanjung Bahari Lombok Timur, dan minyak urut Fahirah dari bahan rumput laut hasil produksi CV. Bulan Bintang Makassar. Uji laboratorium dilaksanakan di Unit Laboratorium Terpadu - Institut Pertanian Bogor.

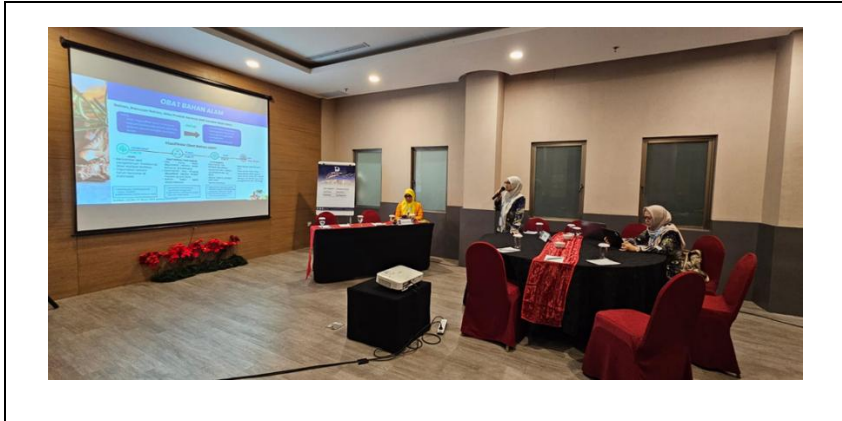


Gambar 18. Sampel produk biofarmakologi

4. Hilirisasi Produk Biofarmakologi

Dalam rangka mendukung Asta Cita kelima yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dilaksanakan Workshop Hilirisasi Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Kelautan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Discovery Ancol Jakarta pada tanggal 4 Desember 2025. Workshop ini merupakan side event Rapat Kerja Teknis Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Peserta berasal dari perwakilan Eselon II an Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan, perguruan tinggi dan UMKM biofarmakologi.

Narasumber workshop yaitu: (1) Prof. Dr.Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi., M.P dengan materi Pengembangan Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut untuk Mendukung Hilirisasi Pangan Fungsional; (2) Dr.rer.nat. Santi Rukminita Anggraeni, S.TP., M.Si dengan materi Pengembangan Bioteknologi dan Farmakologi Laut untuk Kosmetik, (3) Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM dengan materi Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Perizinan Bidang Obat Bahan Alam, dan Ibu Ratnasari dengan materi Pengembangan Rumput Laut menjadi Kosmetik dan Obat Tradisional.



Gambar 19. Dokumentasi kegiatan workshop hilirisasi produk biofarmakologi

Rencana Aksi Triwulan 1 Tahun 2026

1. Peningkatan kapasitas pengolah produk biofarmakologi
2. Pengumpulan data untuk penyusunan IG biofarmakologi

3.1.5. IKK 5 Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)

Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola Sedimen di Laut yang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan optimalisasi hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung volume sedimen yang akan dibersihkan melalui pendataan volume pembersihan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Rencana

Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

Tabel 8. Capaian IKK Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta m³)

SK-5	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan					
IKK - 5	Volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut (juta m ³)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	400 juta m ³	850 juta m ³	120%	400 juta m ³	-	-

Capaian indikator kinerja kegiatan volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada tahun 2025 sebesar 850 juta m³ dari target 400 juta m³ atau sebesar 120%. volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan juga tidak bisa di Renstra DJPK 2029.

Analisis keberhasilan

Keberhasilan kegiatan adalah tercapainya target sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 yaitu volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang diberikan sesuai persetujuan menteri sebesar 400 juta m³.

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut adalah perubahan regulasi menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang terjadi. Kendala lainnya adalah terbatasnya data dan teknologi yang digunakan dalam proses pengelolaan. Perubahan regulasi ini menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian proses bisnis termasuk perizinannya.

Untuk mengatasi kendala pengelolaan hasil sedimentasi di laut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi dan koordinasi lintas sektor. Solusi lainnya adalah peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Investasi dalam sistem pemantauan berbasis teknologi Pelatihan bagi aparatur pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal juga perlu digencarkan agar mereka memahami

pentingnya pengelolaan sedimentasi secara berkelanjutan. Kemitraan dengan institusi riset dan sektor swasta dapat mempercepat inovasi dan adopsi teknologi ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut sangat bergantung pada kemampuan untuk memaksimalkan manfaat sedimen yang diangkat sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungannya. Selain itu, efisiensi juga terkait erat dengan pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi kelembagaan.

Kegiatan pendukung IKK Volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dilaksanakan pada Tahun 2025, antara lain:

- 1) Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut serta mengidentifikasi potensi sedimentasi di laut,
 - Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025 di Surabaya. Kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dipimpin oleh Kepala Tim Kerja Sedimentasi yang diikuti oleh staf Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan narasumber Dr. Eng. M. Badrus Zaman, S.T., M.T dari Institut Teknologi Sepuluh November – Surabaya.
- 2) Sosialisasi Teknis Penyusunan Rencana Kerja Tetap (RKT) Pengelolaan Sedimentasi di Laut
Pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan penggalian pasir laut (Kode KBLI 08104) memerlukan persyaratan :
 1. Persetujuan Menteri
 2. Dokumen Rencana Kerja Tetap (RKT)
 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Kewajiban penyusunan RKT terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Peraturan Menteri KP Nomor 33. Usulan muatan Rencana Kerja Tetap

(RKT) dalam Rancangan Revisi Permen KP Nomor 10 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, berisikan :

1. Company profile
 - a. Informasi Perusahaan (termasuk perubahan Akta)
 - b. Dilengkapi dengan NIB, AHU Kemenku
2. Lokasi Pembersihan
 - a. Peta
 - b. Letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis
3. Rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi, dan sosial
 - a. Rencana Pengelolaan Dampak
 - b. Lampirkan dokumen izin lingkungan lengkap (KA, ANDAL, RKL, RPL)
4. PKKPR
5. Volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut
 - a. Perhitungan volume
 - b. Rencana pemanfaatan
6. Waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut
 - a. Waktu dan jadwal Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut
 - b. Waktu dan jadwal Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut
 - c. Durasi pembersihan
7. Data peralatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut
 - a. Bukti kepemilikan sarana
 - b. Nama sarana
 - c. Jenis sarana
 - d. Spesifikasi sarana
 - e. Bendera kapal
 - f. Jumlah awak kapal
 - g. Ukuran dan daya tamping kapal
 - h. Gross Akta atau *certificate of registration*

- i. Sertifikat keselamatan kapal
8. Metode pembersihan
 - a. Metode, dan tata cara pembersihan
 - b. Desain urutan pekerjaan kegiatan pembersihan
 - c. Desain urutan pekerjaan horizontal kegiatan pembersihan
9. Kerjasama dengan Pelaku Usaha Reklamasi
 - a. Gambaran kegiatan dan reklamasi
 - b. Melampirkan kontrak kerja
10. Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat
 - a. Rencana pelaksanaan kegiatan
 - b. Kesepakatan sosialisasi/konsultasi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah
11. *Feasibility study*



Gambar 20. Dokumentasi kegiatan penyusunan RKT

3) Monitoring Hasil Survey Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut

Kegiatan monitoring diselenggarakan secara daring maupun luring di Hotel AP Premier Batam pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 dan dihadiri oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP, Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Tim Kerja Pengelolaan Kendali Maritim, Pusdatin KKP sebagai undangan, pelaku usaha diantaranya PT. Askara Maritim Indonesia, PT. Barokah Baswara Abadi, PT. Catur Daya Karya Energi, PT. Galian Sukses Mandiri, PT. Karunia Antero Persada, PT. Fahreza Duta Perkasa, PT. Natura Sumber Indonesia, PT. Tuah Selat Durian, PT. Sabbia Andalan Mulya, PT. Rejeki Abadi Lestari dan Dr. rer. nat. Ir.

Arifudin Idrus, ST., MT., IPU., UGM serta Dr.-Ing. Ir. Aryo Prawoto Wibowo, M.Eng., Universitas Islam Bandung sebagai pakar dan penanggap hasil survei.

4). Rapat Pembahasan Modul Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Dalam rangka implementasi Permen KP nomor 33 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dilaksanakan rapat Pembahasan Modul sistem e-logbook pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Beberapa hal sebagai catatan dalam rapat adalah :

- e-logbook sangat penting untuk memonitor dan mengawasi penggunaan izin sesuai yang diberikan,
- sebagai dasar penghitungan PNBP dari sedimen;
- Tercatat di logbook

Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan 1 Tahun 2026 antara lain :

1. Penyusunan Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;;
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Petugas Pemantau Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
3. Monitoring Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;
4. Penyusunan basis data pengelolaan hasil sedimentasi di laut;
5. Penerbitan Surat Persetujuan Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

3.1.6. IKK 6 Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannyaberdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha berbasis risiko memiliki tarif PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Sumber Daya Kelautan (PNBP SDK) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Kegiatan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL), Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Izin Produksi Garam, Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut.

Teknik Menghitung:

Presentase Penyelesaian Perizinan: $\frac{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi}}{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA}} \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi: Total permohonan yang dilakukan verifikasi/pembahasan muatan dokumen perizinannya.

Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA: Total Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS atau ke PTSA KKP

Tabel 9. Capaian IKK Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)

SK-6	Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan					
IKK - 6	Persentase penyelesaian perizinan berusaha sumberdaya kelautan (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	100%	100%	100%	100%	-	-

Capaian indikator kinerja kegiatan persentase penyelesaian perizinan berusaha kelautan (%) pada tahun 2025 sebesar 100%. Indikator kinerja kegiatan persentase penyelesaian perizinan berusaha kelautan merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra DJPK 2029. Namun, capaian IKK persentase penyelesaian perizinan berusaha kelautan ini mendukung capaian target Renstra DJPK Nilai investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan.

Capaian Direktorat Sumberdaya Kelautan dibandingkan Direktorat Jasa Bahari

Capaian indikator kinerja kegiatan persentase penyelesaian perizinan berusaha kelautan (%) pada tahun 2025 sebesar 100%. Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan Direktorat Jasa Bahari memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Dilihat dari jumlah ijin yang berhasil diterbitkan oleh Direktorat Sumberdaya Kelautan sebanyak 13 ijin, sementara Direktorat Jasa Bahari sebanyak 2 ijin terbit.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan pencapaian IKK ini didukung oleh verifikasi teknis, koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga keberhasilan pencapaian output sesuai dengan perencanaan..

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan pelibatan seluruh anggota Tim Kerja dan Kegiatan pendukung lainnya. kegiatan pendukung yang

telah dilaksanakan berdasarkan pencapaian output sesuai target kinerja yaitu melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta pelibatan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga efisiensi biaya dan penggunaan sumberdaya dapat dilaksanakan.

Kegiatan Pendukung

Berdasarkan rencana aksi, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Direktorat Sumber Daya Kelautan pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan antara lain telah melaksanakan konsultasi, asistensi, verifikasi dokumen dan verifikasi lapang kegiatan perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan; melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk mengakses hotline perizinan berusaha terkait kendala yang dihadapi, melakukan *Coaching* kepada para pelaku usaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan. Layanan perizinan Direktorat Jasa Kelautan selama tahun 2025 dilaksanakan secara, luring, online melalui hotline dan OSS.

	
Kegiatan Coaching PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Indonesia Power, Bandung, 9 – 10 Oktober 2025	Kegiatan Verifikasi Dokumen Pengajuan Perizinan Berusaha Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan, Bogor, 13 – 14 November 2025

	
Kegiatan Coaching PT PLN Indonesia Power, Jakarta, 19 Desember 2025	Kegiatan Verifikasi Lapangan Pengajuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang, Jakarta, 30 Desember 2025

Gambar 21. Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim Pelayanan Berusaha

Tabel 10. Inventarisasi data layanan perizinan selama tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Jenis Layanan	Keterangan Respon
1	PT Ainul Hayat Sejahtera	Produksi Garam	Izin terbit 91202046726440004, tanggal 5 April 2025
2	PT Ainul Hayat Sejahtera	Izin Pemanfaatan ALSE (36001)	Izin terbit 91202046726440010, tanggal 2 Juli 2025
3	PT Ainul Hayat Sejahtera	Izin Pemanfaatan ALSE (36002)	Izin terbit 91202046726440011, tanggal 3 Juli 2025
4	PT Dinar Darum Lestari	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 81200038028810030, tanggal 9 Juli 2025
5	PT Bhimasena Power Indonesia	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 81200131715390003, tanggal 9 Juli 2025
	PT ITDC Nusantara Utilitas	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 02200002919090011, tanggal 29 September 2025
7	PT Sari Dumai Sejati	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 81201099624030029, tanggal 29 September 2025
8	PT Merak Energi Indonesia	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 81201170616710010, tanggal 22 Oktober 2025
9	PT Kutai Refinery Nusantara	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 81200018319010044, tanggal 4 November 2025
10	PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1-2	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 81200029710070353, tanggal 25 Desember 2025
11	PT PLN Nusantara Power UP Gresik	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 81200029710070355, tanggal 24 Desember 2025
12	PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit, 81200029710070354, tanggal 25 Desember 2025
13	PT Chandra Asri Pacific Tbk, Site Ciwandan	Izin Pemanfaatan ALSE	Izin terbit 81200110612650019, tanggal 1 Januari 2026
14	PT Asahimas Chemical	Izin Pemanfaatan ALSE	B.2517/DJPK.6/PRL.340/XII/2025, tanggal 23 Desember 2025. Pengembalian Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT Asahimas Chemical
15	PT Merak Chemicals Indonesia	Izin Pemanfaatan ALSE	BA.61/DJPK/XII/2025, tanggal 30 Desember 2025, Verifikasi Lapang Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (Alse) Pt Merak Chemicals Indonesia
16	PT Samudera Gartis Sejahtera	Izin Produksi Garam	B.340/DJPK.6/TU.330/V/2025, tanggal 23 Mei 2025. Permohonan Asistensi Perizinan Berusaha Ekstraksi Garam (KBLI 08930)
17	PT Hamparan Silika Utama	Izin Pemanfaatan Pasir Laut	B.422/DJPK.6/TU.330/VI/2025, tanggal 3 Juni 2025. Permohonan Asistensi Pemenuhan Izin Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

18	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	Izin Pemanfaatan ALSE	B.2431/DJPK.6/TU.330/XII/2025, tanggal 16 Desember 2025 Permohonan Asistensi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) KBLI 36002
19	Direktur Yayasan Pangan Tani Indonesia	Izin Pengangkatan BMKT	Pengembalian Permohonan Izin Pengangkatan BMKT, Nomor: B.2288/DJPK.6/PRL.330/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025.
20	CV Damar Nusantara Abadi	Izin Pengangkatan BMKT	Pengembalian Permohonan Izin Pengangkatan BMKT, Nomor: B.2288/DJPK.6/PRL.330/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025.
21	PT Cornerstone Construction Indonesia	Izin Pengangkatan BMKT	Pengembalian Permohonan Izin Pengangkatan BMKT, Nomor: B.2288/DJPK.6/PRL.330/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025.
22	PT Aksata Karya Inovasi	Izin Pengangkatan BMKT	Pengembalian Permohonan Izin Pengangkatan BMKT, Nomor: B.2288/DJPK.6/PRL.330/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025.
23	PT Bestdeal Digital Indonesia	Izin Pengangkatan BMKT	Pengembalian Permohonan Izin Pengangkatan BMKT, Nomor: B.2288/DJPK.6/PRL.330/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025.
24	CV Agro Sarana Nusantara	Izin Pengangkatan BMKT	Pengembalian Permohonan Izin Pengangkatan BMKT, Nomor: B.2288/DJPK.6/PRL.330/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025.
25	PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.63/DJPK/XII/2025, tanggal 29 Desember 2025, Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala.
26	PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.62/DJPK/XII/2025, tanggal 29 Desember 2025. Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih.
27	PT Randomayang Tambak Lestari	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.56/DJPK/XII/2025, tanggal 15 Desember 2025, Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT Randomayang Tambak Lestari.
28	PT Manakara Sakti Abadi	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.56/DJPK/XII/2025, tanggal 15 Desember 2025, Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (Alse) PT Manakara Sakti Abadi.
29	PT Semesta Alam Permai	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.60/DJPK/XII/2025, tanggal 29 Desember 2025, Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT Semesta Alam Permai.
30	PT Phoenix Resources International	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.54/DJPK/XII/2025, tanggal 15 Desember 2025, Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut

			Selain Energi (ALSE) PT Phoenix Resources International.
31	PT Bumi Harapan Jaya	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.52/DJPK/XII/2025, tanggal 15 Desember 2025, Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT Bumi Harapan Jaya.
32	PT PLN Nusantara Power ULPLTU Anggrek	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.59/DJPK/XII/2025, tanggal 29 Desember 2025, Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT PLN Nusantara Power ULPLTU Anggrek
33	PT PLN Nusantara Power UP Indramayu	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.49/DJPK/XII/2025, tanggal 9 Desember 2025. Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT PLN Nusantara Power UP Indramayu.
34	PT PLN Nusantara Power ULPLTU Ampa	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : B.51/DJPK/XII/2025, tanggal 10 Desember 2025. Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT PLN Nusantara Power ULPLTU Ampa.
35	PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar – Awar	Izin Pemanfaatan ALSE	Berita Acara Nomor : BA.44/DJPK/XII/2025, tanggal 1 Desember 2025. Rapat Pembahasan Dokumen Permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT PLN Nusantara Power UP Tanjung Awar – Awar.

Rencana Aksi Triwulan 1 Tahun 2026

1. Verifikasi dokumen ijin pemanfaatan ALSE PT. PLN Indonesia Power PLTU Lontar UBP Banten 3 Lontar
2. Verifikasi Dokumen Izin Pemanfaatan ALSE PT PLN Power UBP Grati
3. Verifikasi Dokumen Izin Pemanfaatan ALSE PT Sumber Segara Primadaya
4. Verifikasi Dokumen Izin Pemanfaatan ALSE PT. Trimegah Bangun Persada
5. Verifikasi Lapangan PT. PLN Nusantara Power ULPLTU
6. Verifikasi Lapangan PT. PLN Nusantara Power UP Indramayu
7. Verifikasi Lapangan PT. PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala

3.1.7. IKK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk :

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Teknik Menghitung:

Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai) dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian dalam evaluasi implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPK dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPK.

Tabel 10. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

SK-7	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan					
IKK - 7	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	70	80,95	115,64%	70	88,8	91,1%

Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan pada tahun 2025 sebesar 80,95% dari target 70%, sehingga realisasi capaian sebesar 115,64%. indikator kinerja Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian IKK nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2029 telah tercapai 91,1%.

Analisis Keberhasilan:

Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran

informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)"

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)", dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan tim kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap triwulan agar nilai NPSS sesuai target. **Kegiatan yang mendukung** capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain:

- b. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- c. Penyusunan Renstra Teknokratik DJPK Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Triwulan 1 Tahun 2026

- 1. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026

3.1.8. IKU 8 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah

Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPK.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Metode Perhitungan:

Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun

Tabel 11. Capaian Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)

SK-8	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan					
IKK - 8	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	-	-

Capaian IKK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan telah tercapai 3 dokumen atau sebesar 100%. 3 dokumen tersebut terdiri atas dokumen SPIP triwulan 1, 2, dan 3. Indikator kinerja kegiatan Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Indikator ini juga tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2029, namun demikian indikator ini mendukung target Renstra DJPK dalam IKU Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPK.

Pencapaian IKK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Sumber Daya Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPK. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain:

Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

Kegiatan Pendukung:

1. Pemantauan kegiatan pengendalian pada Direktorat Sumber Daya Kelautan,
2. Menyusun form pemantauan manajemen risiko

Rencana Aksi Triwulan 1 Tahun 2026

1. Menyusun laporan bulanan Direktorat Sumberdaya Kelautan

3.1.9. IKU 9 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja.

1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills* atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan

(*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.
5. Formula Perhitungan:

-

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

2. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
3. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
4. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
5. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
6. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Sumber Daya Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IKK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2024 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 12. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (indeks)

SK-9	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan					
IKK - 9	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	80	85,83	107,29%	80	84	102,1%

Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan targetnya dilakukan secara semesteran dan telah dicapai sebesar indeks 85,83 atau sebesar 107,3%. Indikator kinerja kegiatan Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2029 telah tercapai 102,1%.

Analisis Keberhasilan

Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis)

Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menginput sertifikat pada aplikasi <https://asndigital.bkn.go.id/>.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Dalam rangka penggunaan sumber Daya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada Direktorat Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Kegiatan Pendukung:

Adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang diikuti oleh pegawai lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.

3.1.10 IKK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Sumber Daya Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Sumber Daya Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Sumber Daya Kelautan

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Sumber Daya Kelautan

Tabel 13. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan (%)

SK-10	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan					
IKK - 10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	80	95,2	119%	80	84	95,2%

Capaian IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025 sebesar 95,2% dengan target 80,00% atau sebesar 119% atau semua rekomendasi sudah ditindak lanjuti, Capaian IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2025-2029 telah tercapai 119%.

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan ini karena Direktorat Sumberdaya Kelautan aktif memonitor aplikasi SIDAK serta aktif dalam pertemuan dan aktif dalam penyelesaian hasil temuan. Kendala yang dihadapi akibat adanya faktor eksternal dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan ini. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dokumen hasil pengawasan ini.

Terdapat efisiensi pengguna sumberdaya

Wujud efisiensi yang dilakukan dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kegiatan pendukung pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PK dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

3.1.11. IKK 11 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan. Temuan LHP BPK Direktorat Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun sebelumnya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Sumber Daya Kelautan}} \times 100\%$$

Tabel 14. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)

SK-11	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan					
IKK - 11	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	100	100	100%	100	100	100%

Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) pada tahun 2025 telah tercapai 100%.. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2025-2029 telah tercapai 100%.

Analisis Keberhasilan

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan

Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan.

Kegiatan pendukung untuk mencapai IKK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan serta menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.

3.1.12. IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Sumber Daya Kelautan akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan ArsipDengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana KearsipanDengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80

KATEGORI		INTERVAL SKOR
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 15. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

SK-12	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan					
IKK - 12	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Target PK 2025	Target Renstra 2029	% Capaian Renstra 2029
-	80	94	117,5%	94	80	117,5%

Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan sebesar 94 dari target nilai 80, atau tercapai sebesar 117,5%. Capaian IKK nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK 2025-2029 telah tercapai 117,5%.

Analisis keberhasilan

Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PK.

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Direktorat Sumber Daya Kelautan mengetahui indikator ini.

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai

target yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Direktorat Sumber Daya Kelautan memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang yaitu arsiparis ahli terampil.

Kegiatan Pendukung

Pada tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Arsiparis, antara lain:

1. Publikasi arsip pada JIKN di lingkungan Kementerian Kelautan merupakan langkah strategis dalam mendukung keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta pelestarian arsip. Dengan pengelolaan yang baik, arsip KKP dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Monitoring kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT. Indoarsip Kertas karya Buanasentosa (IKKBS) tentang Pemusnahan Dokumen/Arsip. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalin kerja sama dengan PT. Indoarsip Kertas karya Buanasentosa (IKKBS) untuk melakukan pemusnahan dokumen/arsip yang tidak lagi diperlukan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip di KKP. Kegiatan pemusnahan arsip Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, pukul 09.00 WIB s.d selesai, bertempat di PT Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa, Jalan Tanjung Nomor 1, Kawasan Industri Multiguna II, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi 17530, Jawa Barat. telah dilakukan pemusnahan File/Dokumen Arsip sejumlah 31 box (440 Jenis arsip) 148.7 Kg. Pemusnahan File/Dokumen tersebut Metode pemusnahan penghancuran dengan mesin shredder Hasil pemusnahan: Dokumen/arsip telah dihancurkan dan tidak dapat digunakan kembali.
3. Refleksi Kearsipan Akhir Tahun 2025 menuju 2026 kepada seluruh stakeholder rencana tahun 2026 tentang meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai KKP dalam mengelola arsip melalui pelatihan dan pengembangan, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan arsip digital, meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh pegawai KKP dalam mengelola arsip.

Rencana Aksi Triwulan 1 Tahun 2026

1. Pengelolaan arsip dinamis;
2. Penataan dan pendataan arsip dinamis

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 masih 1 (satu) DIPA dan kegiatan dengan Direktorat Jasa Bahari adalah **Rp.826.029.702.396-** dari total anggaran **Rp. 868.418.007.000,-** atau sebesar **(95,12%)**.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 terdapat 12 Indikator Kinerja (IKK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja Direktorat Sumberdaya memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 adalah sebesar 106,44% (Baik). Dari 12 indikator kinerja tersebut, 6 indikator kinerja telah melampaui target, dan 6 indikator kinerja telah mencapai target dengan baik. Rincian capaian ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 17. Capaian kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	%
1. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam	1. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	1	1	100%
2. Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	2. Luas lahan garam yang direvitalisasi (Hektar)	1.000	1.143,99	114,4%
3. Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	3. Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1	1	100%
	4. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit)	1	1	100%
	5. Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	400	850	120%
4. Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan	6. Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	100	100	100%
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	7. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	70	80,95	115,64%
	8. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	3	3	100%
	9. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80	85,83	107,29%
	10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80	95,2	119%
	11. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	100	100	100%
	12. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	80	94	117,5%

Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian program, antara lain: 1) kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) lahan garam ekstensifikasi yang belum sepenuhnya dalam kondisi *clean and clear*; 3) penyelesaian status

BMKT ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) , serta 4) minimnya pemahaman pelaku usaha terkait perijinan berusaha.

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Tahun 2025

Terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan pada tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel

Tabel 18. Tindak lanjut rekomendasi Triwulan II Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti
1.	Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.	Telah diupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.
2	Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Telah diupayakan peningkatan pelaksanaan kegiatan dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan

Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi Triwulan III Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindaklanjuti
1.	Percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual dan swakelola dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.	Telah dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan kontraktual dan swakelola di lingkup Direktorat Sumberdaya Kelautan
2	Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Telah dilaksanakan realisasi anggaran sampai 95%

4.3. Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan sebagai berikut :

1. Menyajikan Dokumen Rencana Aksi yang sesuai khususnya pada aspek total anggaran dalam rencana aksi yang selaras dengan nilai anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja;

2. Menindaklanjuti perubahan anggaran dengan membuat Nota Dinas usulan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Setditjen;
3. Melakukan tindak lanjut dan pemenuhan data dukung atas rekomendasi laporan kinerja.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frista Yorhanita**

Jabatan : Direktur Sumber Daya Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Juni 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Sumber Daya Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Frista Yorhanita

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam	1.	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	1
2.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	2.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1
		3.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1
		4.	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	400
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	80

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam	1.	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	1
2.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	2.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1
		3.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1
		4.	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	400
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	80



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frista Yorhanita**
Jabatan : Direktur Sumber Daya Kelautan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Sumber Daya Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Frista Yorhanita

Lampiran 2. Lanjutan Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan 31 Desember 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam	1.	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	1
2.	Meningkatnya lahan garam yang direvitalisasi	2.	Luas lahan garam yang direvitalisasi (Hektar)	1.000
3.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	3.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1
		4.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1
		5.	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	400
4.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan	6.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	100
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	7.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	70
		8.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	3
		9.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80
		11.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	100
		12.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	80

Lampiran 2. Lanjutan Perjanjian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan 31 Desember 2025

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	877.322.088.000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	1.284.702.000
Total Anggaran Direktorat Sumber Daya Kelautan		878.606.790.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Direktur Sumber Daya Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Frista Yorhanita

Lampiran 3. Rincian Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak Direktorat Sumberdaya Kelautan

PNBP DIREKTORAT SDK 2025										
NO	TANGGAL PEMBAYARAN	AKUN	KODE BILLING	NTPN	NTB	WAJIB BAYAR	KABUPATEN	TOTAL	JENIS SETORAN	KETERANGAN
2025										
1	16 Januari 2025	425259	820250110338786	2B1117QLV21AG9N2	642566770640	PT Agro Makmur Raya	Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau	Rp 2,759,400	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP ALSE PT Agro Makmur Raya
2	30 April 2025	425259	820250219530433	98FDC3CIFTESMF6G	250430024561	PT Agro Makmur Raya	Kota Bitung, Provinsi Sulawesi utara	Rp 1,095,000	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain	PNBP ALSE PT Agro Makmur Raya

									Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	
3	2 Juli 2025	425259	820250630111492	E0AC30NA0DTMUG84	727989727076	PT Ainul Hayat Sejahtera	Perairan Laut Banten, Provinsi Banten	Rp 33,124	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP IZIN PENGAMBILAN AIR LAUT SELAIN ENERGI (PELAYANAN) AN. PT AINUL HAYAT SEJAHTERA
4	8 Juli 2025	425259	820250707133341	CE88E48VVO9I10ST	250708036406	PT Dinar Darum Lestari	Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Rp 1,200	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP permohonan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) PT Dinar Darum Lestari

5	9 Juli 2025	425259	820250707017167	598FA1JNG8ICMFEF	250709000159	PT Bhimasena Power Indonesia	Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah	Rp 759,134,574	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PERMOHONAN IZIN ALSE PT. BHIMASENA POWER INDONESIA
7	25 September 2025	425259	820250924507401	8D3411JNG8OS3O89	42708173976	PT Intibenua Perkasatama	Perairan Selat Malaka, Provinsi Riau	Rp 7,577,400	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP Izin Pemanfaatan ALSE PT Intibenua Perkasatama
8	26 September 2025	425259	820250924495223	5BD703CIFTTKTCBN	805303237206	PT Wira Inno Mas	Samudera Hindia, Provinsi Sumatera Barat	Rp 2,872,094	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan	PNBP Izin Pemanfaatan ALSE PT Wira Inno Mas

									Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	
11	8 Oktober 2025	425259	820251006154752	C78332G503DMCE00	251008019012	PT Dinar Darum Lestari	Kabupaten Badung, Provinsi Bali	Rp 456,250	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP Izin Pemanfaatan ALSE PT. Dinar Darum Lestari
12	9 Oktober 2025	425259	820251003837623	704BB7QLV2RUJN5N	251009200501	PT Lotte Chemical Indonesia	Laut Jawa, Provinsi Banten	Rp 109,120,000	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non	PNBP IZIN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI (ALSE) PT. Lotte Chemical Indonesia

									Produk (Pelayanan)	
13	21 Oktober 2025	425259	820251018882271	459261JNG8RM3R6V	477311142644	PT Merak Energi Indonesia	Kab. Serang, Provinsi Banten	Rp 48,960,000	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP Ijin Pemanfaatan ALSE PT. Merak Energi Indonesia
14	24 Oktober 2025	425259	820251020068856	A4D9E61QVDNL91VO	FT25297KF7L2	PT Meulaboh Power Generation	Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh	Rp 4,303,973	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP Ijin Pemanfaatan ALSE Meulaboh Power Generation

15	4 November 2025	425259	820251029415371	84AC11JNG8S059EB	251104034874	PT. Musim Mas	Batam, Prov. Kepulauan Riau	Rp 2,803,200	PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP Ijin Pemanfaatan ALSE PT. Musim Mas
16	5 November 2025	425259	820251029490098	EF6EA7QLV2SN2IDI	251104033722	PT. Kutai Refinery Nusantara	Kab. Balikpapan, PROV. Kalimantan Timur	Rp 10,512,000	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP Ijin Pemanfaatan ALSE PT. Kutai Refinery Nusantara

17	14 November 2025	425259	820251114657027	03E8D6U8F8CRSL83	251114047756	PT. Intibenua Perkasatama	Perairan Selat Malaka, Provinsi Riau	Rp 319,375	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP Ijin Pemanfaatan ALSE PT. Intibenua Perkasatama
18	12 Desember 2025	425259	82025120564152	78C353CIFU61199L	251208200100	PT Lotte Chemical Titan Nusantara	Selat Sunda, Provinsi Banten	Rp 40,515,000	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	Penerbitan Izin Pemanfaatan ALSE PT Lotte Chemical Titan Nusantara
19	23 Desember 2025	425259	820251222962135	142D855DFJBABRUN	66227059618	PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Gresik	Kabupaten Gresik Jawa Timur	Rp 236,284,425	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan	PNBP Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE KBLI 36002) PT PLN Nusantara

									Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	Power Unit Pembangkitan Gresik
20	24 Desember 2025	425259	820251222947490	784E40NA0EFCADL2	490690063397	PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9		Rp 188,248,536	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	PNBP Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE KBLI 36002) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 9
21	24 Desember 2025	425259	820251222964251	94F651JNG91ONU0R	22207105480	PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2		Rp 207,473,024	XIV. PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PEMANFAATAN DI LAUT - C. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) - 2. Pemanfaatan Air Laut Selain	PNBP Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE KBLI 36002) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2

									Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan)	
22	29 Desember 2025	425259	820251224432390	6DCF43CIFU6IUNO6	000097777941	PT Chandra Asri Pasific site Ciwandan	Banten	Rp 250,954,290		PNBP Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE KBLI 36002) PT Chandra Asri Pasific site Ciwandan
23	16 Desember 2025	425259	820251214850405	2EA6255DFJB2KAB5	668817354232	Politeknik Keuangan Negara STAN		Rp 250,000	Pemanfaatan Marine Heritage Gallery	PNBP Penggunaan Ruang Galeri BMKT Mahasiswa Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Politeknik Keuangan Negara STAN guna pembelajaran Pengenaln BMKT dan Praktik Penilaian BMKT

24	19 Desember 2025	425259	820251217351487	A61636UBFBFTQKPV	118064949406	RRI Siaran Luar Negeri		Rp 250,000	Pemanfaatan Marine Heritage Gallery	PNBP Penggunaan Ruang Galeri BMKT RRI Siaran Luar Negeri Podcast Tematik Digital
25	12 November 2025	425259	820251112324522	023162G503GRK5KQ	955304118806	Sekolah Victory Plus		Rp 250,000	Pemanfaatan Marine Heritage Gallery	PNBP Penggunaan Ruang Galeri BMKT Sekolah Victory Plus Pembelajaran Ekosistem Laut
Total realisasi Januari - Desember 2025								Rp 1,878,124,921		

Lampiran 4. Piagam Penghargaan atas Capaian Kinerja Direktorat Sumberdaya Kelautan Tahun 2025

